

Improving Accountability and Transparency in Nonprofit Educational Organizations through the Implementation of ISAK 35

Sistya Rachmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Bhakti
e-mail: sistya.rachmawati@stietribhakti.ac.id



<https://doi.org/10.36526/gandrung.v7i1.7405>

Abstract: *The implementation of community service and independent implementation of non-profit educational organizations plays an important role in providing quality educational services without a profit orientation. However, challenges in maintaining accountability and transparency still often occur, especially in terms of financial reporting. The application of Financial Accounting Standards Interpretation (ISAK) 35: Presentation of Financial Statements of Non-Profit Entities is a strategic step to ensure that the financial statements of non-profit educational institutions can reflect the actual conditions and are easily understood by stakeholders. This PKM activity aims to improve the understanding and implementation of ISAK 35 in non-profit educational institutions partnered with Tri Bhakti University through training, mentoring, and the preparation of ISAK 35-based financial report models. The results of this activity show a significant increase in the understanding of foundation administrators regarding the principles of accountability, financial report structure, and public information disclosure. With the implementation of ISAK 35, partner educational institutions are able to produce more transparent, relevant, and reliable financial reports as a form of accountability to the public and donors*

Keywords: Accountability, Transparency, ISAK 35, Non-Profit Organizations, Independent PKM

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri memberikan kontribusi sangat besar yang diawali dengan menyampaikan pengertian akuntansi yaitu suatu kegiatan jasa yang memiliki fungsi sebagai penyedia informasi kuantitatif, dan bersifat keuangan dalam suatu entitas usaha/ekonomi tertentu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terbaik diantara berbagai pilihan alternatif tindakan yang ada. Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sector swasta/ komersial/ perusahaan dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik atau disebut juga organisasi non laba ada beberapa jenis, salah satunya adalah Yayasan (Kholifah et al., 2023).

Organisasi nirlaba di bidang pendidikan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Lembaga pendidikan nirlaba, seperti yayasan pendidikan, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai agen sosial yang berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh lembaga pendidikan negeri (Ebrahim, 2016; Mardiasmo, 2021). Melalui

berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan, lembaga pendidikan nirlaba berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan integritas sosial yang kuat.

Di balik peran strategis tersebut, organisasi nirlaba pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), yang menuntut organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada para pemangku kepentingan (Putra et al., 2024). Dalam konteks lembaga pendidikan nirlaba, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan (Vianto & Siswantoro, 2024).

Sumber pendanaan lembaga pendidikan nirlaba umumnya berasal dari berbagai pihak, antara lain sumbangan masyarakat, donatur, hibah lembaga, bantuan pemerintah, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberagaman sumber dana tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai UU No. 28 Thn 2004 tentang Yayasan (IAI, 2020); (Karim & Dakir, 2025). Pengelolaan dana yang tidak akuntabel berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, memicu kecurigaan terhadap integritas lembaga, serta menghambat keberlanjutan organisasi nirlaba di sektor pendidikan (Julyana et al., 2024).

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan organisasi nirlaba. Transparansi mengacu pada keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta capaian kinerja organisasi. Transparansi yang baik memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga donor, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan finansial lembaga pendidikan nirlaba (Makawakes et al., 2025). Dengan demikian, transparansi berperan sebagai instrumen pengendalian yang mendorong efisiensi, mencegah penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik.

Sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan yang komprehensif, meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, serta catatan atas laporan

keuangan. Penerapan standar ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja organisasi serta pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (IAI, 2020).

Namun demikian, masih banyak lembaga pendidikan nirlaba yang memandang penyusunan laporan keuangan sebatas sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Akibatnya, laporan keuangan sering disusun secara sederhana, tidak lengkap, dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga informasi yang dihasilkan kurang bermanfaat bagi analisis dan pengambilan keputusan manajerial (Diviana et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan kapasitas lembaga pendidikan nirlaba dalam menerapkan ISAK 35 secara tepat. Kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 12 Bekasi serta pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan, dengan tujuan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip akuntansi nirlaba dan implementasinya dalam penyusunan laporan keuangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan lembaga pendidikan nirlaba mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman dan penerapan ISAK 35 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga pendidikan nirlaba di Indonesia. Penerapan standar akuntansi yang tepat akan mendorong terwujudnya transparansi pengelolaan dana, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas dan berkelanjutan.

Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi terhadap lembaga pendidikan nirlaba yang menjadi mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), ditemukan bahwa lembaga masih menghadapi beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan tentang akuntabilitas dan transparansi. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman konsep akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba.

Pengurus dan pengelola lembaga pendidikan nirlaba umumnya belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar tata kelola organisasi nonlaba. Akibatnya, sistem pertanggungjawaban terhadap pihak donor, masyarakat, dan pemerintah belum berjalan optimal.

2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi.

Sebagian besar staf keuangan di lembaga mitra belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan akuntansi yang memadai. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa lembaga mitra membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman akuntabilitas, penerapan ISAK 35, dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Kondisi ini menjadi dasar urgensi pelaksanaan kegiatan PkM untuk memperkuat tata kelola keuangan lembaga pendidikan nirlaba agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Tujuan

Kegiatan PkM ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman pengurus dan pengelola lembaga pendidikan nirlaba mengenai konsep akuntabilitas dan transparansi.
- b) Mengeliminasi kemampuan SDM dibidang akuntansi guna mendorong terwujudnya tata kelola lembaga pendidikan transparan dan berkelanjutan.

Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35*” yang dilakukan oleh dosen STIE Tri Bakti, diharapkan memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

a) Manfaat bagi Siswa

Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam kegiatan PkM ini memberikan pengalaman nyata di luar ruang kelas yang memperkaya wawasan akademik sekaligus meningkatkan keterampilan praktis. Siswa dapat belajar secara langsung bagaimana konsep akuntansi dan standar pelaporan keuangan, seperti ISAK 35, diterapkan di dunia nyata — khususnya pada organisasi nirlaba pendidikan.

Selain itu, Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, terutama di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen lembaga nirlaba. Lebih jauh lagi, keterlibatan siswa dalam PkM juga menumbuhkan empati sosial dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini berperan dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas, peduli sosial, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.

b) Manfaat bagi Dosen STIE Tri bhakti

Kegiatan PkM ini menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi profesional serta

memperluas pengalaman praktis di bidang akuntansi nirlaba. Dosen dapat menerapkan keilmuannya secara langsung dalam konteks sosial, memperkuat relevansi antara teori dan praktik, serta menambah wawasan tentang dinamika pengelolaan organisasi nirlaba di sektor pendidikan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pengembangan karier akademik, karena hasil PkM dapat dijadikan bahan publikasi ilmiah, laporan penelitian terapan, maupun referensi pengajaran di kelas. Melalui interaksi dengan pengelola lembaga pendidikan nirlaba, dosen dapat memperoleh insight baru yang relevan untuk memperkaya materi perkuliahan, terutama dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi.

c) Manfaat bagi Universitas Tri Bhakti

Bagi Universitas Tri Bhakti, pelaksanaan kegiatan PkM ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat peran universitas sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, universitas dapat menunjukkan kontribusinya secara nyata dalam mendukung tata kelola lembaga pendidikan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan citra dan reputasi Universitas Tri Bhakti sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan di Indonesia. Keterlibatan universitas dalam mendampingi lembaga pendidikan nirlaba juga dapat membuka peluang kerja sama baru, baik dengan yayasan pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi sosial lainnya.

Dari sisi akademik, kegiatan PkM ini memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa universitas mampu menjembatani antara teori akademik dengan praktik di lapangan, serta mendorong terciptanya sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, kegiatan ini akan mendukung pengembangan mutu pendidikan universitas secara menyeluruh, baik dari aspek relevansi kurikulum, inovasi pembelajaran, maupun penguatan budaya riset dan pengabdian.

d) Manfaat bagi Sekolah

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memberikan manfaat strategis bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola. Melalui program PkM, sekolah memperoleh penguatan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik bagi pimpinan maupun tenaga pendidik dan kependidikan, dalam mengelola administrasi, keuangan, serta pelaksanaan program pendidikan secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PkM berperan sebagai sarana transfer ilmu dan pendampingan yang

mendorong sekolah untuk mengadopsi praktik-praktik pengelolaan yang lebih profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan, terbangunnya budaya transparansi dan tanggung jawab, serta menguatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap sekolah sebagai institusi pendidikan yang berintegritas.

Pendekatan Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis situasi, lembaga pendidikan nirlaba yang menjadi mitra kegiatan PkM ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan PkM ini menawarkan beberapa solusi strategis yang dirancang secara sistematis, yaitu:

- a) Pelatihan dan workshop tentang konsep akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba, guna meningkatkan pemahaman pengurus serta pengelola lembaga.
- b) Penyusunan panduan akuntabilitas dan transparansi berbasis ISAK 35 yang dapat digunakan oleh lembaga mitra sebagai acuan pelaporan keuangan berkelanjutan.

Dengan kombinasi kegiatan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi tersebut, diharapkan lembaga pendidikan nirlaba mitra dapat membangun budaya akuntabilitas yang kuat serta meningkatkan transparansi sesuai dengan prinsip ISAK 35.

Khalayak Sasaran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35*” dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, khususnya bagi lembaga pendidikan nirlaba yang menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Oleh karena itu, khalayak sasaran dalam kegiatan ini dipilih secara spesifik agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Pelaksana PKM

Tabel 1. Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Nama	Kualifikasi	Keahlian	Tugas dalam kegiatan
1	Dr. Sistya Rachmawati, SE., M.AppFin	Dosen STIE Tri Bhakti	Akuntansi	Persiapan, Koordinasi Dengan Mitra, Penjajakan Lokasi, Persiapan Materi / PPT, Pelaksanaan Pelatihan, Review Kuesioner, Pembuatan Laporan, dan Publikasi.

METODE

1. Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan PkM penting untuk meminimalisir kesalahan dan kegiatan dapat berjalan terarah, lancar, dan sesuai sasaran. Adapun tahapan antara lain:

1. Dosen STIE Tri Bhakti mengumpulkan data dan informasi di lapangan, yaitu tentang Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35, meliputi sejarah maupun tujuan, program pengembangan, dan lain-lain agar dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
2. Selanjutnya dosen pelaksana PKM melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan pengurus sekolah kapan tanggal dan waktu pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan tentang Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35 untuk menunjang penyuluhan dan pelatihan.

2. Materi Kegiatan

Materi kegiatan terlebih dulu dipersiapkan dan disampaikan sebelum kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan, agar pelaksanaan pelatihan dapat tercapai secara efektif. Materi kegiatan dipersiapkan dan disampaikan melalui berbagai cara, yaitu:

- Materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- File makalah/modul disampaikan melalui email.
- Komunikasi dan tatap muka 2 arah dilaksanakan di SMA Negeri 12, Bekasi.
- Melakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta dengan tujuan menggali permasalahan dan pengalaman dari para peserta.
- Dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui pemahaman peserta PKM tentang materi yang akan disampaikan.
- Dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi manfaat dari kegiatan PkM.

3. Pelaksanaan / Metode Pelaksanaan

Kegiatan PkM Mandiri ini dilaksanakan secara offline pada hari Sabtu, 22 November 2025, Jam 14.00-15.00. Peserta penyuluhan dan pelatihan ini adalah para Siswa SMA Negeri 12, Bekasi beralamatkan di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Adapun metode pelaksanaannya sebagai berikut:

- Persiapan: Dosen STIE Tri Bhakti mempersiapkan materi bahan presentasi dan peralatan yang diperlukan untuk penyuluhan dan pelatihan Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35.
- Pendampingan: Dosen STIE Tri Bhakti setelah memberikan penyuluhan dan pelatihan, akan memberikan pendampingan kepada para Siswa SMA Negeri 12, Bekasi sehingga mereka benar-benar mampu dan terampil dalam Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35.
- Monitoring dan Evaluasi: Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan, dosen STIE Tri Bhakti melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara sistematis untuk menilai efektivitas pelatihan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.





Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba Pendidikan melalui Penerapan ISAK 35” telah memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yang terlibat, baik peserta, komunitas sasaran, maupun pelaksana kegiatan. Hasil yang dicapai mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi di lingkungan lembaga pendidikan nirlaba.

A. Hasil bagi Peserta

Peserta kegiatan adalah siswa agar memperoleh pemahaman mengenai konsep akuntabilitas dan penerapan ISAK 35. Melalui sesi pelatihan dan pendampingan, peserta mampu memahami struktur laporan keuangan organisasi nirlaba, termasuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Selain itu, peserta mulai mampu membedakan klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat, serta memahami cara pencatatan transaksi sumbangan, hibah, dan bantuan operasional sekolah. Kesadaran akan pentingnya transparansi keuangan juga meningkat, ditandai dengan komitmen peserta untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di lembaga masing-masing.

B. Hasil bagi Komunitas / Lembaga Mitra

Komunitas sasaran, yaitu lembaga pendidikan nirlaba yang menjadi mitra PkM, menunjukkan perubahan positif setelah mengikuti kegiatan. Lembaga mulai menerapkan sistem pelaporan yang lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi. Pengurus yayasan menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait seperti donatur, wali murid, dan masyarakat sekitar.

Kegiatan ini juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan mitra karena adanya keterbukaan informasi keuangan yang lebih baik. Selain itu, lembaga mulai menyadari pentingnya standar akuntansi nirlaba sebagai panduan profesional dalam pengelolaan keuangan. Beberapa lembaga bahkan membentuk tim kecil yang bertugas untuk menindaklanjuti penerapan ISAK 35 secara berkelanjutan di masa mendatang.

C. Hasil bagi Pelaksana PkM

Bagi pelaksana, baik dosen maupun mahasiswa dari Universitas Tri Bhakti, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu pengetahuan di lapangan. Dosen dapat memperkuat perannya sebagai pendidik dan praktisi dengan memberikan bimbingan langsung kepada masyarakat, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam mendampingi lembaga nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, pelaksana berhasil memperkuat sinergi antara dunia akademik dan masyarakat, sekaligus memperluas jaringan kemitraan universitas dengan lembaga pendidikan nonformal dan yayasan. Hasil kegiatan ini juga menjadi dasar bagi pengembangan bahan ajar, publikasi ilmiah, dan kegiatan lanjutan dalam bidang akuntansi sektor publik dan nirlaba.

2. Evaluasi

Tingkat ketercapaian hasil, impek, manfaat kegiatan, tolok ukur /tes yang dipakai, sebelum dan setelah dilaksanakan PKM adalah tingkat keberhasilan dilihat dari hasil kuesioner yang menyatakan bahwa materi sesuai dan para peserta mendapatkan manfaat serta nilai tambah dari hasil presentasi yang dilakukan oleh penyaji yaitu dosen STIE Tri Bhakti, setelah mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan.

Hasil survei awal tentang sejauh mana pemahaman peserta tentang konsep pengelolaan keuangan dan konsep laporan keuangan untuk lembaga non laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum pelatihan

No	Indikator	Rata-rata
1	Mengetahui konsep pengelolaan keuangan	3,50
2	Paham mengenai konsep pengelolaan keuangan	2,50
3	Mampu menerapkan konsep pengelolaan keuangan	2,00
4	Mengetahui konsep laporan keuangan lembaga non laba	1,50
5	Paham mengenai konsep laporan keuangan lembaga non laba	1,00
6	Mampu menerapkan konsep laporan keuangan lembaga non laba	1,50

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa peserta memiliki tingkat pengetahuan rata-rata sebesar 3,50 dan tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan sebesar 2,50 pada skala penilaian 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai konsep dasar pengelolaan keuangan. Namun demikian, kemampuan peserta dalam menerapkan konsep tersebut ke dalam praktik masih relatif terbatas, yang tercermin dari nilai rata-rata penerapan sebesar 2,00.

Di sisi lain, rata-rata tingkat pengetahuan sebesar 1,50 dan pemahaman sebesar 1,00 terkait konsep laporan keuangan lembaga nonlaba, yang berada di bawah nilai 3, mengindikasikan bahwa penguasaan peserta terhadap konsep pelaporan keuangan entitas nonlaba masih tergolong rendah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual umum mengenai pengelolaan keuangan dan pemahaman yang lebih spesifik terkait penyusunan serta pelaporan keuangan lembaga nonlaba. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan guna memperkuat kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi nonlaba secara komprehensif.

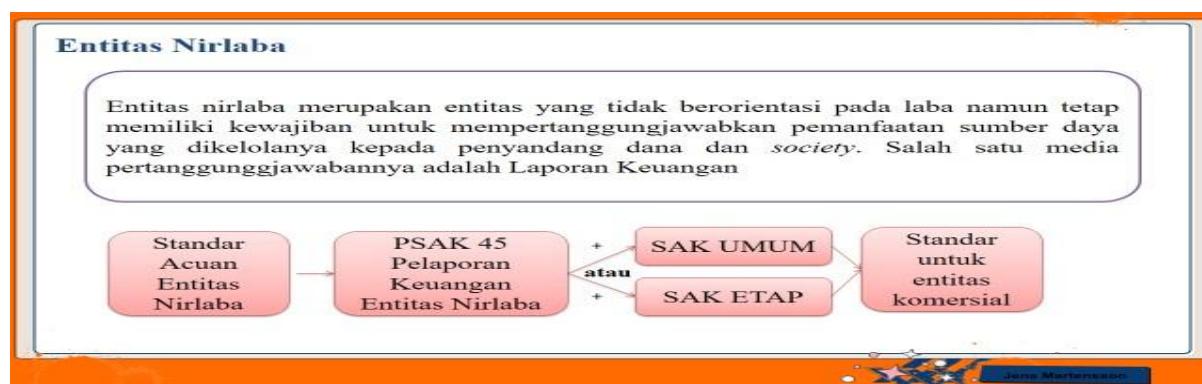
Setelah memahami pentingnya entitas nirlaba serta tantangan yang masih dihadapi lembaga pendidikan nirlaba dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya, pada kesempatan ini akan disampaikan materi yang menjadi solusi sekaligus upaya penguatan tata kelola, yaitu penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba pendidikan. Melalui pemaparan ini, akan membahas konsep dasar akuntabilitas dan transparansi, tujuan serta ruang lingkup ISAK 35, hingga praktik penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Harapannya, materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi pedoman bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan keharusan dalam memberikan pertanggungjawaban dan melaksanakan tugas yang sudah

diberikan dan bagaimana suatu organisasi tersebut memberikan suatu keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang memerlukan laporan (Mubin, 2018). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menujukan suatu laporan atau catatan mengenai keuangan atau kegiatan yang menjelaskan terkait penyelenggaraan disuatu organisasi untuk dipertanggungjawabkan (Afifah & Faturrahman, 2021).

Implementasi standar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan masih menjadi tantangan signifikan bagi banyak entitas nirlaba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi nirlaba menghadapi kendala sumber daya manusia yang terbatas, termasuk kurangnya pemahaman teknis terhadap prinsip akuntansi dan standar pelaporan seperti ISAK 35 maupun PSAK 45. Seringkali pengurus organisasi hanya memiliki pengetahuan dasar akuntansi sehingga proses penyusunan laporan keuangan tidak mencerminkan format standar yang disyaratkan, dan menyebabkan laporan yang dihasilkan kurang informatif bagi pemangku kepentingan (Setiadi, 2021). Hambatan lain yang muncul adalah ketersediaan sumber daya finansial dan perangkat teknologi akuntansi yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan data keuangan entitas nirlaba (Wahyuni et al., 2025).

Selain itu, studi empiris menemukan bahwa dalam praktiknya, banyak pengurus organisasi nirlaba belum sepenuhnya memahami isi dan aplikasi standar akuntansi yang berlaku bagi sektor nirlaba, sehingga penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan masih lemah. Misalnya, meskipun organisasi nirlaba sudah memiliki pedoman standar pelaporan, namun penyusunan laporan yang komprehensif masih membutuhkan pendampingan dan pelatihan yang intensif agar sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam standar akuntansi entitas nirlaba (Indriastuti, 2023).

Berikut uraian tentang entitas nirlaba serta acuan penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba dalam PSAK 45/ISAK 35 yang dijelaskan kepada peserta:



Gambar 2. Pengertian Entitas Nirlaba

Secara umum, organisasi sektor publik dengan ciri utama nirlaba itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah dan organisasi nirlaba swasta. Sekolah yang menjadi sasaran dalam PKM kali ini termasuk dalam organisasi nirlaba swasta. Dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 3. Praktik Akuntansi Entitas Nirlaba



Gambar 4. Jenis Entitas Nirlaba

Dalam PKM kali ini dijelaskan juga kepada peserta tentang konsep praktik akuntabilitas organisasi nirlaba serta acuan atau peraturan dalam standar akuntansi terkait akuntabilitas tersebut. Uraian penjelasannya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 5. Praktik Akuntabilitas Entitas Nirlaba

Fungsi dari laporan keuangan yang wajib dibuat oleh entitas nirlaba adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan atas entitas tersebut. Seperti pengambilan keputusan tentang Investasi, pemberian kredit, pengenaan pajak oleh pemerintah dan lain sebagainya. Pengguna laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari pengguna eksternal, yang dapat dijabarkan sbb berikut:



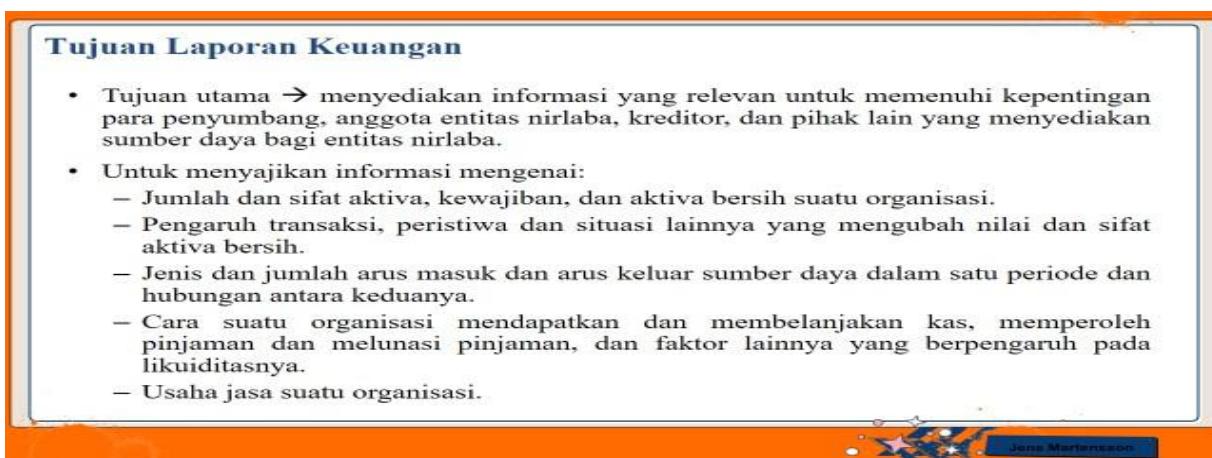
Gambar 6. Pengguna Laporan Ekternal Entitas Nirlaba

Selain pengguna eksternal, terdapat juga pengguna internal laporan keuangan entitas nirlaba, yang secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 7. Pengguna Laporan Internal Entitas Nirlaba

Laporan keuangan yang disusun oleh entitas nirlaba mempunyai tujuan untuk memberikan informasi-informasi terkait keuangan entitas nir laba, seperti yang terjabar dalam gambar berikut:



Gambar 8. Tujuan Laporan Keuangan

Selanjutnya peserta PKM diberi kesempatan untuk bertanya dan dijelaskan oleh pemateri. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta adalah apa dasar pengelompokan dari masing-masing transaksi yang terjadi di sekolah, bagaimana pengakuan asset pemilik sekolah yang digunakan dalam operasional sekolah, apakah diakui sebagai hutang atau setoran modal pemilik. Masih terkait asset, peserta menyakan bagaimana cara dan dasar penakukan biaya atas asset tetap yang digunakan dalam operasional sekolah. Dengan penjabaran dan diskusi oleh pemateri terkait pertanyaan-pertanyaan peserta atas kasus yang ada disekolah masing-masing ini, audience bisa mendapat pemahaman konsep dan praktik secara lebih mendalam tentang perlakukan transaksi keuangan sekolah.

Tabel 3. Pengetahuan dan pemahaman peserta setelah pelatihan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Mengetahui konsep pengelolaan keuangan	4,50
2.	Paham mengenai konsep pengelolaan keuangan	4,50
3.	Mampu menerapkan konsep pengelolaan keuangan	4,00
4.	Mengetahui konsep laporan keuangan lembaga non laba	4,50
5.	Paham mengenai konsep laporan keuangan lembaga non laba	4,00
6.	Mampu menerapkan konsep laporan keuangan lembaga non laba	4,00

Sumber: Data diolah

Selain itu, dalam kuesioner untuk peserta juga disampaikan pertanyaan tentang manfaat dari kegiatan PKM dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Manfaat untuk peserta setelah mengikuti Pelatihan

No.	Manfaat	Rata-rata
1.	Peserta merasa mendapat pengetahuan baru	4,80
2.	Peserta merasa kegiatan sangat bermanfaat	4,80
3.	Materi bisa diterapkan memperbaiki pengelolaan keuangan sekolah	4,50
4.	Peserta merasa puas mengikuti kegiatan	4,80
5.	Peserta menginginkan adanya keberlanjutan kegiatan	4,80

Sumber: Data diolah

3. Luaran yang Dihasilkan

Luaran yang akan dihasilkan oleh Tim PKM adalah sebagai berikut: PPT PKM dan Publikasi di Jurnal PkM: Jurnal PkM Abdikaryasakti yang akan diterbitkan oleh Universitas Trisakti.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Organisasi nirlaba di sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Dalam menjalankan peran tersebut, lembaga pendidikan nirlaba dituntut untuk menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang kuat mencerminkan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara etis dan sistematis,

sementara transparansi memastikan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.

Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga pendidikan nirlaba. Melalui standar ini, laporan keuangan disusun secara lebih terstruktur, informatif, dan dapat dibandingkan, sehingga mampu mendukung proses evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan. Namun demikian, rendahnya pemahaman dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam implementasi ISAK 35, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

Saran

Lembaga pendidikan nirlaba disarankan untuk meningkatkan komitmen terhadap penerapan ISAK 35 secara transparan dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik dengan mengikuti pelatihan akuntansi nirlaba maupun dengan melibatkan tenaga profesional yang memahami standar pelaporan keuangan entitas nonlaba. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan transparansi yang efektif.

Selain itu, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat terus mendorong kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada pendampingan penerapan ISAK 35 di lembaga pendidikan nirlaba. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan nyata lembaga sasaran. Melalui sinergi antara akademisi, praktisi, dan pengelola lembaga pendidikan, diharapkan tata kelola organisasi nirlaba pendidikan dapat semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35 pada Yayasan An-Nahl Bintan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(01), 24–34.
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- Ebrahim, A. (2016). The many faces of nonprofit accountability. *The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management*, 102–123.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Indriastuti, M. (2023). Implementasi ISAK 35 Sebagai Manifestasi "Sifat Amanah" Pada Organisasi Nirlaba. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 7, 92–108. <https://doi.org/10.35837/subs.v7i2.2446>
- Julyana, F., Sulaeman, S., & Himawan, I. S. (2024). Analisis Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Yayasan: Studi Kasus Pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Raudlatul Athfal "Al-Ikhlas" Sukabumi. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 484–499.
- Karim, A., & Dakir, S. R. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Donasi Untuk Pendidikan Anak di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya. *Journal of Islamic Education Management*.
- Kholifah, K., Wahyudi, U., & Hasan, K. (2023). ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS YANG BERORIENTASI NON LABA (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhasabah Wal Mahabbah Bitaharil Imam). *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10), 1198–1205.
- Makawekes, M. T., Alexander, S. W., & Tirayoh, V. Z. (2025). Penerapan ISAK Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Yayasan Sekolah Luar Biasa Finjil Bitung. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 3(2), 386–394.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 80–92.
- Putra, T. S., Akbar, B., Friska, R., Rengasamy, D., & Noorjahan, M. (2024). Transparency in Ensuring Governance and Accountability of Non-Profit Institutions: Lessons from Malaysia and India. *Lex Publica*, 11(1), 118–138.
- Setiadi, S. (2021). Implementasi Isak 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2).
- Vianto, J., & Siswantoro, D. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Yayasan XYZ. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 37–55.
- Wahyuni, W., Toatubun, W., Papalia, S., & Anggraini, R. (2025). Challenges and Opportunities in Implementing Social Accounting: Insights from Non-Profit Organizations. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 25–37.